



Musim Hujan Usai, Yogya Punya PR Dampak Bencana

Dari kerusakan talut sungai hingga jalan longsor.

L.N. Idayanie
idayani@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan ada belasan dampak bencana selama Januari hingga Maret 2017 yang harus ditangani. "Butuh klasifikasi penanggung jawab penanganannya, mengingat banyak lokasi banjir dan tanah longsor triwulan pertama tahun ini," kata Kepala Pelaksana BPBD

DIY, Krido Suprayitno, dalam evaluasi dampak bencana dengan DPRD DIY, kemarin.

Sejumlah ruas jalan dan infrastruktur yang rusak memang membutuhkan penanganan. Di antaranya ruas jalan Ngalang-Hargomulyo, Kabupaten Gunungkidul, ruas jalan Dekso-Samigaluh-Pagerharjo, dan Congot-Ngremang, Kabupaten Kulon Progo.

Selain itu, ada ruas jalan di Jeruk Wudel-Sadeng,

Gunungkidul; jembatan Denggung, Sleman; serta talut pengamanan SMAN 1 Cangkringan, Sleman. "Dampak longsor, ada yang sudah tertangani sementara. Ada yang masih membahayakan pengguna jalan. Perlu segera diperbaiki," kata Krido.

Enam titik ruas jalan dan infrastruktur yang rusak akibat tanah longsor membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,3 miliar. Kebutuhan terbesar adalah rehabilitasi dan rekonstruksi di Congot-Ngremang, Kulon Progo, yakni hampir Rp 500 juta. Tapi ruas jalan itu dapat ditangani dengan dana

rutin.

Berbeda dengan ruas jalan Ngalang-Hargomulyo, Gunungkidul, dan Dekso-Samigaluh-Pagerharjo, Kulon Progo. Kedua prasarana tersebut lebih mendesak. Sebab, jalan rusak separuhnya dan membahayakan pengguna jalan. Dua titik itu rencananya menggunakan dana belanja tak terduga.

Krido mengatakan kerusakan talut sungai pada Januari-Maret yang masih menjadi pekerjaan rumah sedikitnya ada 11 titik. Di antaranya talut Demak Ijo, Sleman, dan talut tebing Sungai Winongo di Desa

Ngestiharjo, Bantul.

Adapun kerusakan talut Sungai Code sebanyak sembilan titik, yang tersebar di Gondokusuman, Tegalrejo, dan Jetis. "Sebagian mengancam permukiman," kata Krido. Di antaranya talut di Kampung Gowongan dan Terban. Perbaikan talut sungai merupakan wewenang Balai Besar Wilayah Sungai Opak.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, meminta agar penanganan kerusakan ini memperhatikan siapa penanggung jawab pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksinya. Tujuannya

agar pekerjaan cepat selesai dan tak saling lempar tanggung jawab. "Yang ditangani provinsi biar diselesaikan. Pelaksanaan dan anggarannya dari provinsi. Pemerintah kabupaten/kota mengurus koordinasi dan mengawal penanganannya," ujarnya.

Eko menambahkan, pada 2018, pemerintah mendesak seluruh desa dan kampung di DIY menjadi kampung tangguh bencana. "Dengan kampung tangguh bencana ini, yang terpenting adalah mitigasi atau penanganan saat masyarakat menghadapi bencana, agar lebih siap," kata dia.

● PRIBADI WIGASONGO

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
- ☐ Untuk Diketahui
- ☐ Jumpa Pers

Netral Biasa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPBD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005